



Penguatan Pelestarian Warisan Budaya: Studi Kasus Pura Besakih dalam Kerangka Konservasi Internasional

Nisa Maharani

Kajian Pariwisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, Indonesia

*Email Korespondensi: maharani24004@student.unud.ac.id

Diterima: 11-09-2025 | Disetujui: 21-09-2025 | Diterbitkan: 23-09-2025

ABSTRACT

Bali Island, a province renowned for its exceptional tourism potential, offers a rich blend of natural beauty, cultural heritage and community-driven creative tourism initiatives. Among its cultural treasures is Pura Besakih, a temple complex that has been proposed as a UNESCO World Heritage Site since 1995. Despite its significance, the management of Pura Besakih faces challenges related to transparency and the limited involvement of professionals in cultural heritage preservation. This study employs a qualitative descriptives approach, utilizing tourism management methods grounded in local cultural values and aligned with global standard. The focus is on the four primary management function planning, organizing, actuating and controlling (Krisdayanthi dkk., 2023) implemented through cross-sector collaboration. Consequently, the management of Pura Agung Besakih should adopt an adaptive, participatory and sustainable model, aimed not only at preserving the temple's sanctity as a spiritual site but also at reinforcing its status as a world-class cultural attraction.

Keywords: Bali Tourism Management, Pura Besakih Preservation, Cultural Heritage Sustainability, Adaptive Participatory Management

ABSTRAK

Pulau Bali, salah satu provinsi yang memiliki potensi pariwisata luar biasa. Mulai dari keindahan alam, warisan budaya, hingga kreativitas masyarakat dalam menciptakan wisata buatan. Salah satu warisan budaya di Pulau Bali adalah Pura Besakih, Pura Besakih merupakan Situs Warisan Dunia yang telah diusulkan kepada UNESCO sejak tahun 1995. Namun pengelolaan Pura Besakih masih dihadapkan pada isu transparansi yang tidak melibatkan pihak profesional dalam hal pelestarian warisan budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode manajemen pariwisata berbasis nilai budaya lokal dan standar global, dengan fokus pada empat fungsi utama manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan (Krisdayanthi dkk., 2023) yang dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, pengelolaan Pura Agung Besakih perlu diarahkan pada model yang adaptif, partisipatif dan berkelanjutan, tidak hanya dapat menjaga kesucian pura sebagai situs spiritual, melainkan juga memperkuat posisinya sebagai daya tarik budaya dikelas dunia.

Kata kunci: Manajemen Pariwisata Bali, Pelestarian Pura Besakih, Keberlanjutan Warisan Budaya, Manajemen Partisipatif Adaptif

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nisa Maharani. (2025). Penguatan Pelestarian Warisan Budaya: Studi Kasus Pura Besakih dalam Kerangka Konservasi Internasional. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(3), 1259-1268. <https://doi.org/10.63822/8hkr0b49>

PENDAHULUAN

Pariwisata yang merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat diandalkan dalam mempertahankan pembangunan nasional, juga memberikan kontribusi masif bagi perekonomian negara melalui perolehan valuta asing, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan pajak maupun penguatan neraca pembayaran (Desembrianita & Adianto, 2017). Ini berarti pariwisata bukan hanya berisi industri hiburan, melainkan alat strategis untuk pengembangan ekonomi. Pengembangan sektor pariwisata dapat menghasilkan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Jika pariwisata berkembang secara berkelanjutan, maka peluang ekonomi juga dapat terbuka luas, sektor transportasi, penginapan, hingga usaha mikro masyarakat lokal yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung juga ikut diuntungkan (Desembrianita & Adianto, 2017). Pulau Bali, salah satu provinsi yang memiliki potensi pariwisata luar biasa. Mulai dari keindahan alam, warisan budaya, hingga kreativitas masyarakat dalam menciptakan wisata buatan. Salah satu warisan budaya di Pulau Bali adalah Pura Besakih atau Pura Agung Besakih. Keberadaan Pura Agung Besakih termasuk kedalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Pura Agung besakih yang merupakan Pura terbesar di Bali dan di Indonesia bagi umat Hindu, terletak di Kabupaten Karangasem tepatnya di Desa Besakih, telah dikategorikan dalam Daya Tarik Wisata. Menurut data Dinas Pariwisata Daerah Bali (2024), data kunjungan wisatawan ke Pura Agung Besakih adalah sebagai berikut.

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Wisatawan	239.432	44.839	8.695	90.682	145.925	163.925

Gambar 1. Data kunjungan wisatawan ke Pura Agung Besakih tahun 2019-2024

Sumber : Dinas Pariwisata Daerah Bali 2024 (diakses *online* 2025)

Berdasarkan gambar diatas dapat ditinjau bahwasanya terdapat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Pura Agung Besakih, kenaikan sekitar 18.000 wisatawan menunjukkan yang awalnya 145.925 (2023) menjadi 163.925 (2024). Hal ini menunjukkan sektor pariwisata mengalami kebangkitan pasca pandemi *COVID-19*, dimana kunjungan wisatawan sebesar 8.695 (2021) merupakan titik terendah dikarenakan adanya pandemi *COVID-19*.

Pura Agung Besakih yang mendapat julukan “*The Mother of Temple*” adalah pusat dari keseluruhan Pura yang berada di Pulau Bali. Letaknya berada di tengah Pulau Bali sebagai pusat mandala, di kaki Gunung Agung yang merupakan gunung tertinggi di Bali. Pura Agung Besakih yang diapit oleh 4 Pura antara lain Pura Luhur Uluwatu dibagian Selatan, Pura Tanah Lot dibagian Barat, Pura Lempuyang dibagian Timur dan Pura Batur dibagian Utara merupakan Situs Warisan Dunia yang telah diusulkan kepada *UNESCO* sejak tahun 1995. Pengelolaan pariwisata yang berisi warisan budaya, tidak hanya menjadi sarana pelestarian nilai-nilai yang terkandung dari masa lalu, tetapi juga sebagai strategi keberlanjutan destinasi di tengah era modern dan digital.

Warisan budaya tidak hanya sekedar benda mati yang dijaga dari waktu ke waktu, melainkan juga entitas hidup yang berinteraksi secara terus menerus dengan masyarakat lokal, wisatawan dan perubahan sosial. *UNESCO* melalui Konvensi Warisan Dunia menjelaskan pentingnya konservasi nilai otentik dan integritas situs warisan dunia dan mendorong tidak hanya pelibatan pemerintah, tetapi komunitas lokal juga terlibat dalam mengelola warisan budaya (Disko, 2017; Meskell, 2013). Pelestarian warisan budaya di era

modern harus menyeimbangkan antara pelestarian fisik, pemaknaan spiritual maupun pemanfaatan pariwisata. Namun, keberadaannya sebagai destinasi wisata menghadirkan tantangan multidimensi, terutama dalam pengelolaan kawasan suci yang harus menjaga nilai kesakralan ditengah adanya tuntutan pariwisata massal dan modernisasi fasilitas saat ini.

Dalam konteks lokal, pengelolaan Pura Agung Besakih masih dihadapkan pada isu transparansi yang tidak melibatkan pihak profesional dalam hal pelestarian warisan budaya. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi kritis atas pengelolaan Pura Agung Besakih sebagai warisan budaya dunia dalam era modern. Penelitian ini akan berfokus pada analisis kebijakan, praktek pengelolaan dan pelibatan pemangku kepentingan, serta mengaitkannya dengan standar global pelestarian warisan budaya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi pengelolaan warisan budaya yang adaptif serta berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan situs warisan budaya di Bali telah menjadi perhatian utama dari berbagai pihak, terutama ketika tempat suci seperti pura juga berfungsi sebagai daya tarik wisata di era sekarang. Studi oleh Wijana (2019) dalam konteks Pura Puseh dan Pura Desa di Desa Batuan menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki peran penting dalam pengelolaan pura sebagai daya tarik wisata. Relevansi dengan penelitian ini terletak pada pentingnya kolaborasi antara masyarakat lokal dengan pemerintah dalam pelestarian situs suci seperti Pura Besakih. Sementara itu, penelitian Sumaeni & Mahagangga (2018) mengenai Pura Tirta Empul menjelaskan sistem pengelolaan tradisional dapat diintegrasikan dengan strategi pengelolaan pariwisata. Pengelolaan yang mempertahankan nilai-nilai sakral sekaligus memberikan akses bagi wisatawan dapat dianggap sebagai model yang potensial untuk pengembangan wisata warisan budaya. Penelitian tersebut memperkuat alasan bahwa Pura Besakih juga memerlukan pengelolaan yang dapat menjaga keseimbangan antara kesucian situs budaya dan kesiapan terhadap pariwisata.

Widiarta (2016) dalam kajiannya terhadap Pura Taman Ayun menjelaskan pentingnya pelestarian yakni sebagai bagian dari warisan budaya dunia. Pengelolaan yang melibatkan berbagai lapisan pemangku kepentingan termasuk UNESCO, membuka kajian penting tentang standar internasional dalam pengelolaan situs budaya. Hal ini berkaitan erat dengan fokus penelitian saat ini, yakni bagaimana Pura Besakih dikelola sesuai dengan standar global sambil mempertahankan identitas lokal. Putra dkk. (2018) meneliti perencanaan Masterplan Pura Bukit Amerta, menunjukkan perlu adanya pendekatan berbasis perspektif masyarakat pengguna. Penelitian tersebut menegaskan bahwa rancangan tata ruang situs suci harus memperhatikan kebutuhan spiritual masyarakat lokal. Studi ini relevan dengan pengelolaan Pura Agung Besakih, mengingat kompleksitasnya sebagai pusat spiritual umat Hindu di Bali yang juga menjadi destinasi pariwisata utama di Bali. Sulistyanto (2020) dalam penelitiannya mengangkat isu benturan kepentingan dalam pengelolaan warisan budaya di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya tarik-menarik antara kepentingan ekonomi, politik dan spiritual yang sering kali menciptakan konflik didalam praktek pengelolaan. Dengan rujukan ini penting dalam memahami tantangan pengelolaan Pura Besakih, terutama dalam hal kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Wibawa dkk. (2023) menggunakan pendekatan game theory untuk menganalisis strategi pengelolaan Pura Agung Besakih. Mereka menyarankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat lokal agar pengelolaan tidak menjadi *zero-sum game*. Penelitian tersebut sejalan dengan fokus

penelitian sekarang yang menitikberatkan pada pentingnya kolaborasi antara desa adat, pemerintah kabupaten serta pemerintah provinsi. Penelitian Prabawa dkk. (2023) menjelaskan strategi komunikasi dalam relokasi pedagang di kawasan Pura Agung Besakih, bagaimana komunikasi yang tepat antara pengelola dan masyarakat menjadi kunci dalam menghindari konflik sosial. Hal ini mendukung pandangan bahwa pengelolaan Pura Agung Besakih tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan administratif, tetapi memerlukan sensitivitas dalam segi sosial dan budaya. Kemudian penelitian oleh Supartini dkk. (2024) menjelaskan manajemen operasional kawasan Pura Agung Besakih, pentingnya efisiensi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan warisan budaya berskala besar sangat membutuhkan sistem birokrasi yang baik dan efektif tanpa mengorbankan nilai-nilai spiritual maupun nilai adat yang melekat. Lebih lanjut penelitian Berti & Purnama (2023) menjelaskan aspek sejarah Pura Agung Besakih sebagai daya tarik wisata. Penelitian tersebut berisi pentingnya pendekatan interpretatif dalam menyampaikan nilai-nilai sejarah dan spiritual kepada wisatawan. Penelitian ini mendukung pentingnya narasi budaya dalam pengelolaan warisan leluhur agar tetap relevan terutama di era modern dan digitalisasi.

Gariyasa dkk. (2023) menjelaskan strategi pengembangan destinasi berbasis warisan di Taman Ayun. Penelitian tersebut ditekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan komunitas lokal dalam meningkatkan daya saing destinasi budaya. Relevansi dengan penelitian ini, terletak pada perlunya sinergi yang sama dalam pengelolaan Pura Agung Besakih sebagai destinasi warisan dunia. Kemudian penelitian Harnika dkk. (2025) mengenai Pura Lingsar dan Makam Batu Dendeng menjelaskan bahwa aspek edukatif dan nilai multikultural perlu diintegrasikan dalam pengelolaan situs religious dan pendekatan tersebut dapat menjadi inspirasi dalam memperkaya pengalaman pengunjung Pura Agung Besakih, tanpa mengganggu makna spiritual yang terdapat didalamnya. Lebih lanjut penelitian Prakasa dkk. (2024) mengusulkan model pengembangan ekowisata berbasis komunitas yang menitikkan masyarakat lokal sebagai aktor utama. Model ini sejalan dengan semangat kolaborasi yang ingin diangkat dalam pengelolaan Pura Agung Besakih, di mana masyarakat adat sebagai pemilik tradisi menjadi pilar utama. Penelitian terakhir, Faried & Ariana (2025) membahas strategi pengembangan kawasan wisata warisan di Kota Bandung dengan pendekatan lintas sektor dan multidisipliner. Strategi tersebut memberikan gambaran bahwa pengelolaan warisan budaya sangat memerlukan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan, yang juga menjadi fokus utama dalam studi pengelolaan Pura Agung Besakih. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian sekarang akan berfokus terhadap pengelolaan Pura Agung Besakih dengan menggunakan metode GAP Standar Global UNESCO, ICCROM dan ICOMOS sebagai pengukur indikator dan analisis pengelolaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengelolaan Pura Agung Besakih. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber jurnal dan publikasi relevan.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus yang berfokus pada analisis mendalam terhadap pengelolaan Pura Agung Besakih dan bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif aspek-aspek pengelolaan yang memiliki urgensi dalam pelaksanaannya.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Pura Agung Besakih, yang terletak di Desa Besakih, Kabupaten Karangasem, Bali. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu ikon utama pariwisata budaya di Bali dengan pengaruh yang signifikan terhadap sektor pariwisata dan pelestarian budaya.

Sumber dan Jenis Data

- Data Primer : Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengelola Pura Besakih serta pengunjung yang memiliki pengalaman langsung terkait pengelolaan dan fungsi pura.
- Data Sekunder : Data sekunder diperoleh dari laporan resmi Dinas Pariwisata Daerah, artikel ilmiah dan publikasi terkait Pura Besakih.

Metode Pengumpulan Data

- Wawancara : Teknik wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informan kunci, yaitu pengelola Pura Agung Besakih dan pengunjung, guna memperoleh data yang kaya dan kontekstual.
- Studi Dokumentasi : Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai publikasi resmi, artikel ilmiah dan data statistik yang relevan dengan pengelolaan dan pelestarian Pura Besakih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan isu transparansi yang terjadi di Pura Agung Besakih dengan tidak melibatkan pihak profesional dalam hal pelestarian warisan budaya, maka pengelolaan destinasi warisan budaya Pura Agung Besakih tidak hanya berfokus pada aspek administratif atau pelestarian fisik semata, melainkan juga sebagai cermin upaya melayani masyarakat luas, baik bagi pemeluk spiritual maupun wisatawan yang tertarik dengan budaya. Pengelolaan dalam konteks ini mengacu pada model pengelolaan yang terstruktur dan terarah. Sebagai bagian dari Warisan Budaya Dunia, pendekatan pengelolaan juga merujuk pada standar global. Dalam pedoman operasional Konvensi Warisan Dunia *UNESCO* (1972), disebutkan bahwa setiap situs harus memiliki *Outstanding Universal Value (OUV)* yang tidak hanya penting, tetapi juga dapat diakui nilainya oleh dunia. Pengelolaannya harus didasari oleh rencana manajemen jangka panjang yang tidak hanya melindungi fisik situs, tetapi juga memastikan kelestarian nilai, tradisi maupun integritas budayanya (Meskell, 2014). Kemudian prinsip dari *ICOMOS* melalui *Nara Document on Authenticity* (Stovel, 2008) menegaskan bahwa autentisitas situs warisan budaya tidak hanya bisa diukur dari bentuk fisik atau material, melainkan juga dari dimensi nilai-nilai lokal seperti tradisi, fungsi spiritual, teknik, suasana sampai makna budaya yang hidup. Pengelolaan yang berhasil adalah pengelolaan yang mampu melindungi dimensi-dimensi tersebut, tanpa terjebak pada komodifikasi yang mengikis keaslian situs budaya menurut *ICOMOS* tahun 1994 (Alyusuf, 2019; Disko, 2017; Grima, 2017). Selain itu, *ICCROM* menekankan pentingnya pendekatan berbasis pelibatan masyarakat lokal. Komunitas adat dan masyarakat harus menjadi aktor utama dan bukan sekedar penerima kebijakan. Hal ini membutuhkan strategi penguatan kapasitas, baik melalui pelatihan teknis pelestarian maupun dalam penciptaan forum-forum kolaboratif yang menggabungkan

pemerintah, akademisi, pengelola pariwisata dan masyarakat (Disko, 2017). Oleh karena itu, konsep pengelolaan yang diusung dalam penelitian ini adalah pendekatan manajemen pariwisata berbasis nilai budaya lokal dan standar global, dengan fokus pada lima fungsi utama manajemen perencanaan, pengorganisasian, motivasi, pelaksanaan serta pengawasan yang dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor. Namun, pada penelitian ini, pengelolaan Pura Agung Besakih dapat difokuskan analisis melalui empat fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan menurut manajemen klasik Terry (Krisdayanthi dkk., 2023) sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Pada tahap perencanaan, visi dan misi pengelolaan Besakih dirumuskan untuk menyeimbangkan nilai sakral dan fungsi pariwisata. Beberapa inisiatif perencanaan yang telah diimplementasikan. Yang pertama yaitu zonasi kawasan dimana menetapkan area mandala suci, mandala madya dan mandala nista untuk memisahkan jalur ritual dan kunjungan wisatawan. Kemudian alur kunjungan dengan desain rute satu arah untuk meminimalkan kerumunan dan mencegah dampak erosi pada bangunan pura. Selanjutnya relokasi pedagang dimana sudah disediakan 300 kios bagi masyarakat lokal di sekitar Pura Agung Besakih di zona komersial, dengan penempatan berdasarkan studi kelayakan untuk menjaga estetika dan kenyamanan pengunjung. Dengan perencanaan jangka panjang, Pura Besakih dapat menyusun dokumen Manajemen Risiko dan Rencana Pelestarian terintegrasi yang selaras dengan pedoman *UNESCO* dimana pedoman tersebut menuntut keberlanjutan fisik dan budaya (Disko, 2017)

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian telah meliputi struktur kelembagaan dan distribusi peran. HPI dari Desa Adat kemudian Kabupaten lalu Provinsi, dimana himpunan Pemangku Pura Indonesia memfasilitasi koordinasi lintas tingkat pemerintahan dan adat. Peran pemangku kepentingan adalah bertugas pada ritual dan tata sukerta (desa adat), pemerintah kabupaten mengurus infrastruktur dasar, sedangkan provinsi menyediakan regulasi dan pendanaan strategis. Dalam keterlibatan masyarakat, krama adat, pemandu lokal dan pedagang terorganisir dalam asosiasi masing-masing guna mempermudah komunikasi serta pengambilan keputusan. Model ini telah mencerminkan *stakeholder theory*, dimana setiap aktor telah memiliki tanggung jawab jelas sesuai kapasitas dan kewenangannya.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Pada bagian penggerakan, berfokus pada implementasi program dan motivasi. Program edukasi dan sosialisasi pada pemandu wisata yang mendapat pelatihan rutin melalui Dinas Pariwisata Bali guna memastikan pemahaman spiritual dan nilai budaya tersampaikan akurat kepada wisatawan secara nyaman dan tepat. Kemudian, keterlibatan krama adat dalam organisir dan upacara bersama rutin diadakan untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang kolektif. Lalu komunikasi terpadu ditandai dengan strategi komunikasi pengelola dalam relokasi pedagang yang mengutamakan komunikasi dua arah sehingga pedagang lokal disekitarnya merasa dilibatkan, bukan sekadar terdampak kebijakan. Melalui gerakan-gerakan ini, nilai spiritual dan sosial Pura Besakih telah dikelola sebagai “*living heritage*” yang hidup ditengah era modernisasi.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan bertujuan menjaga keberlanjutan dan kepatuhan di destinasi wisata. Evaluasi kunjungan dengan survei kepuasan dari wisatawan dan pemantauan dampak lingkungan dilakukan secara rutin untuk menyesuaikan kebijakan operasional. Kemudian penegakan aturan dimana tim keamanan dan pengurus adat memastikan aturan pakaian adat dan “halangan” ditaati wisatawan demi kesucian kawasan.

Lalu sistem pelaporan adanya kerusakan fisik atau konflik kepentingan dapat dilaporkan melalui mekanisme terpadu, dimulai dari tingkat desa adat hingga provinsi dengan alokasi dana cepat melalui APBD bila dibutuhkan. Dengan prosedur kontrol yang jelas, Pura Agung Besakih mampu mempertahankan integritas spiritual dan keaslian budaya sesuai standar internasional yang ada.

Kemudian, berdasarkan standar global, pengelolaan situs warisan budaya harus selaras antara praktik lokal dan standar global guna menjamin keberlanjutan nilai-nilai yang terjaga dan terkandung didalamnya. Pertama, keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan situs terlihat sangat kuat. Semua keputusan penting terkait perbaikan, konservasi maupun pembatasan akses wisatawan dimulai dari musyawarah desa adat sebelum diteruskan ke bagian pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pelibatan masyarakat lokal telah berjalan baik dan kontekstual di Pura Besakih, sebagaimana disarankan *ICCROM* (Feary dkk., 2015; Prakasa dkk., 2024). Kedua, pengelolaan akses wisatawan dilakukan bukan hanya berdasarkan pertimbangan teknis yang berada di lapangan, tetapi juga berdasarkan nilai spiritual dan kesucian Pura Agung Besakih.

Zona suci terlihat benar-benar dijaga oleh pengelola, dimana pengunjung hanya diizinkan masuk apabila berniat beribadah dengan tanda membawa persembahan dan mengenakan pakaian adat. Pendekatan ini jauh lebih holistik dibanding sekadar menetapkan aturan ataupun larangan administratif serta dapat memperkuat kesadaran wisatawan tentang nilai-nilai lokal yang terkandung didalamnya. Ketiga, rapat evaluasi dan pengawasan dilakukan secara rutin setiap bulan di lokasi pura oleh para pemangku kepentingan. Rapat ini bukan hanya menjadi forum administrasi, melainkan sebagai ruang spiritual, edukatif dan sosial antara lapisan pemangku kepentingan.

Menurut Gariyasa dkk. (2023), keberlanjutan pengelolaan situs warisan sangatlah bergantung pada forum koordinasi yang konsisten dengan basis kepercayaan, sebagaimana yang telah terbentuk dalam pengelolaan Pura Agung Besakih. Pengelolaan situs warisan budaya harus selaras antara praktik lokal dan standar global guna menjamin keberlanjutan nilai-nilai yang terjaga dan terkandung di dalamnya. Pura Agung Besakih, sebagai pusat spiritual umat Hindu Bali dan simbol identitas budaya yang sangat kuat, memiliki karakteristik yang kompleks karena menyatukan nilai religius, arsitektural dan sosial. Meskipun pengelolaan Pura Agung Besakih menunjukkan banyaknya kesesuaian dengan prinsip-prinsip global maupun dalam hal pelibatan masyarakat serta pelestarian nilai spiritual, terdapat sejumlah kesenjangan ketika dibandingkan secara langsung dengan standar global yang direkomendasikan oleh *UNESCO*, *ICOMOS* dan *ICCROM*.

Kesenjangan ini tidak selalu menandakan adanya kegagalan, melainkan lebih pada area yang masih dapat diperkuat lagi guna mencapai pengelolaan yang lebih inklusif, transparan dan berstandar internasional. Salah satu kesenjangan utama terletak pada aspek transparansi dan akses terhadap dokumen pengelolaan di Pura Agung Besakih. Standar internasional, terutama dalam *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (UNESCO)*, yakni pentingnya keberadaan dokumen rencana pengelolaan yang tidak hanya lengkap serta terstruktur, tetapi juga dapat diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas. Di Pura Agung Besakih, meskipun pihak pengelola menyatakan bahwa dokumen rencana jangka panjang telah ada, namun hanya *siteplan* yang bisa diakses oleh publik, dokumen lain yang bersifat internal tidak dapat diakses oleh masyarakat umum (publik).

Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi, serta mengurangi partisipasi publik yang lebih luas guna memahami dan mendukung pelestarian situs budaya tersebut. Penyebab utama dari kondisi ini, yakni kemungkinan adanya persepsi bahwa keterbukaan informasi dapat mengganggu nilai kesakralan

situs budaya, serta belum adanya sistem digitalisasi informasi yang efisien dan menjamin keamanan bagi situs warisan budaya yang bersifat religius. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan situs secara umum telah berjalan dengan baik. Komunitas adat, *stakeholder*, perempuan dan pemuda ikut aktif dalam proses pelestarian situs budaya, baik dalam konteks ritual keagamaan maupun dalam pemeliharaan fasilitas yang terdapat di Pura Agung Besakih.

Praktik ini telah memenuhi apa yang direkomendasikan oleh ICCROM dalam hal konservasi berbasis masyarakat (Disko, 2017). Namun, partisipasi tersebut belum didukung dengan mekanisme secara formal, seperti regulasi tertulis atau kebijakan yang menjamin keberlanjutan peran masyarakat secara sistemik. Kemudian, belum tersedia forum khusus yang terorganisir secara administratif untuk penyampaian aspirasi atau penyelesaian konflik yang menjadi salah satu elemen penting dalam kerangka manajemen partisipatif berstandar global. Dalam hal manajemen risiko dan daya dukung situs, standar UNESCO menyarankan adanya sistem yang dapat mengantisipasi potensi kerusakan fisik, konflik sosial maupun dampak negatif dari adanya pariwisata (Grima, 2017).

Di Pura Agung Besakih, telah diterapkan pembatasan yang ketat terhadap akses wisatawan ke zona suci, serta dilakukan rapat rutin setiap bulan yang juga berfungsi sebagai forum evaluasi dan pengawasan secara periodik. Namun, belum ditemukan bukti adanya sistem penilaian resiko yang komprehensif dalam bentuk dokumen tertulis, seperti rencana mitigasi bencana, kapasitas maksimum pengunjung ataupun simulasi penanganan konflik sosial. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan kapasitas SDM serta belum adanya kolaborasi intensif dengan institusi akademik atau konservator secara profesional. Sementara itu, dalam aspek autentisitas dan nilai budaya lokal, pengelolaan Pura Agung Besakih telah mencerminkan pemahaman secara mendalam terhadap nilai-nilai lokal yang kontekstual, sesuai dengan pedoman *Nara Document on Authenticity* dari ICOMOS.

Pengelola dan masyarakat memahami, serta turut menjaga struktur simbolik dan spiritual situs melalui filosofi tujuh tingkat kehidupan yang sangat khas di Pura tersebut. Namun, nilai-nilai tersebut belum terdokumentasi secara akademik dalam bentuk publikasi atau arsip digital yang dapat dijadikan rujukan oleh generasi berikutnya maupun pihak eksternal dikemudian hari. Hal ini menunjukkan kesenjangan dalam sistem dokumentasi dan diseminasi nilai autentisitas secara sistematis serta profesional. Dari sisi kolaborasi *stakeholder*, meskipun hubungan antara desa adat dan pemerintah provinsi cukup solid, partisipasi pihak ketiga seperti akademisi, lembaga penelitian dan konservator profesional masih sangat terbatas di Pura Agung Besakih.

Berdasarkan standar ICCROM sangat menyarankan pentingnya kerja lintas disiplin dalam pengelolaan warisan budaya, agar pelestarian tidak hanya bersifat teknis tetapi juga berbasis ilmu pengetahuan dan pendekatan interdisipliner (Disko, 2017). Keterbatasan ini kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya inisiatif kelembagaan atau belum adanya platform resmi yang mempertemukan para aktor dari sektor akademik dan komunitas didalamnya. Terakhir, kesenjangan juga terlihat dalam diseminasi informasi publik dan edukasi pengunjung. Meski terdapat pemandu lokal dan aturan berpakaian yang jelas, penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi dan promosi nilai-nilai budaya masih belum optimal dan dapat dimaksimalkan.

Penyebabnya dapat dilacak pada kurangnya SDM dengan keahlian dalam pengelolaan media digital, serta kemungkinan terdapat anggapan bahwa penyebaran informasi daring belum menjadi prioritas dalam konteks pengelolaan situs spiritual. Dengan mengidentifikasi berbagai kesenjangan tersebut, maka pengelolaan Pura Agung Besakih kedepan dapat diarahkan guna memperkuat aspek dokumentasi,

transparansi, pelibatan akademisi dan pemanfaatan teknologi informasi. Upaya tersebut penting tidak hanya guna menyelaraskan diri dengan standar internasional, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan pelestarian nilai-nilai spiritual, kultural dan sosial situs yang terkandung didalamnya bagi generasi yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan kesenjangan yang telah diidentifikasi sebelumnya, jika tidak ditangani secara strategis, dapat berdampak pada penurunan integritas situs dalam jangka panjang. Minimnya keterbukaan informasi publik terkait dokumen manajemen dan sistem inventarisasi, sebagai contoh dapat menyebabkan terbatasnya dukungan eksternal, kesulitan dalam proses nominasi warisan dunia, serta munculnya kesan eksklusivitas yang bertentangan dengan semangat pelestarian inklusif. Dari sisi akademik, Pura Agung Besakih sebenarnya memiliki potensi besar sebagai model studi komunitas berbasis warisan budaya. Sebagaimana dikemukakan oleh Harnika dkk. (2025), model pengelolaan yang menyatukan nilai spiritual, struktur adat dan kerja sama pemerintahan menjadi dasar kuat untuk riset-riset interdisipliner dibidang pariwisata, antropologi, arsitektur hingga manajemen krisis budaya.

Pengelolaan wisatawan berupa aturan ketat yang telah diberlakukan sudah sangat sesuai, berdampak pada belum adanya kasus pelanggaran yang terjadi pada Pura Agung Besakih. Dokumentasi terhadap filosofi spiritual seperti struktur tujuh tingkat, jika dikembangkan melalui pendekatan ilmiah dan digital dapat memperkaya khazanah pengetahuan warisan budaya Indonesia secara global. Secara praktis, terdapat peluang perbaikan jangka pendek seperti peningkatan kapasitas SDM dalam bidang komunikasi digital, pembukaan kanal informasi yang aman dan terstruktur, serta penguatan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi. Dalam jangka panjang, Pura Besakih dapat dikembangkan sebagai pusat pendidikan warisan budaya berbasis spiritualitas lokal, sekaligus menjadi model nominasi situs warisan dunia berbasis pendekatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyusuf, A. (2019). *Best Practice for Marketing Heritage Site: Analysing the Medina National Museum in Saudi Arabia*. <https://journal.uui.ac.id/CCCMS/article/view/12638>
- Berti, V. R., & Purnama, A. N. (2023). Pura Agung Besakih Sebagai Objek Wisata Sejarah Di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. *Jurnal Nirwasita*, 4(1), 88–97. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7781542>
- Desembrianita, E., & Adianto, S. S. (2017). Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa & Inovasi Meningkatkan Kepuasan Konsumen dan Kinerja Pemasaran pada Daya Tarik Wisata Jatim Park II Kota Batu. *Ekonomika Jurnal Ekonomi*, 10(2), 67–75.
- Dinas Pariwisata Daerah Bali. 2024, Mei. Kunjungan Wisatawan ke Daya Tarik Wisata. Diakses pada 8 Juni 2025, dari <https://disparda.baliprov.go.id/wp-content/uploads/2024/05/Kunjungan-Wisatawan-ke-Daya-TarikWisata.xlsx>
- Disko, S. (2017). *Indigenous Cultural Heritage in the Implementation of UNESCO's World Heritage Convention: Opportunities, Obstacles and Challenges*. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctv2gjwsw2.6>
- Fariied, R. K., & Ariana, N. (2025). *Development Strategy for Heritage Tourism Areas in Bandung City*.

- Feary, S., Brown, S., Marshall, D., Lilley, I., Mckinnon, R., Verschuuren, B., & Wild, R. (2015). *ANU Press Chapter Title: EARTH'S CULTURAL HERITAGE*. ANU Press.
- Gariyasa, N. M. C., Sendra, I. M., & Kristianto, Y. (2023). The Development Strategy of Tourist Attraction in Taman Ayun Temple, Badung, Bali. *European Modern Studies Journal*, 7(4), 71–77. [https://doi.org/10.59573/emsj.7\(4\).2023.6](https://doi.org/10.59573/emsj.7(4).2023.6)
- Grima, R. (2017). *Presenting archaeological sites to the public*. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1vxm8r7.10>
- Harnika, N. N., Sendra, I. M., Putra, I. N. D., & Kristanto, Y. (2025). Educational aspects in the development of multicultural tourism: A multisite study on Pura Lingsar and Makam Batu Dendeng. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(4), 1190–1200. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i4.6224>
- Krisdayanthi, A., Darma, I. G. K. I. P., & Meliana, N. M. D. (2023). Pengelolaan Museum Rudana Sebagai Daya Tarik Wisata Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 345–357. <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i2.2436>
- Meskeel, L. (2013). UNESCO's World Heritage Convention at 40: Challenging the economic and political order of International Heritage Conservation. *Current Anthropology*, 54(4), 483–494. <https://doi.org/10.1086/671136>
- Meskeel, L. (2014). States of Conservation: Protection, Politics, and Pacting within UNESCO's World Heritage Committee. Dalam *Source: Anthropological Quarterly* (Vol. 87, Nomor 1).
- Prabawa, B. A. T., Dewi, M. I. K., Swarthini, N. N. A., Swadanasari, L. K. A., & Kusuma, I. M. D. J. (2023). STRATEGI KOMUNIKASI PENGELOLA PURA DALAM RELOKASI PEDAGANG DI KAWASAN PURA BESAKIH. Dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Budaya* | (Vol. 18, Nomor 2).
- Prakasa, Y., Arida, I. N. S., & Sendra, I. M. (2024). Collaborative Development of Community-based Ecotourism at the Lembanna Tourist Attraction, Gowa Regency, South Sulawesi Province. *European Modern Studies Journal*, 8(3), 24–49. [https://doi.org/10.59573/emsj.8\(3\).2024.3](https://doi.org/10.59573/emsj.8(3).2024.3)
- Putra, I. N. G. M., Nurwasih, N. W., & Pratiwi, N. M. W. (2018). Merancang Dengan Pertimbangan Perspektif Masyarakat Pengguna Studi Kasus Perencanaan Masterplan Pura Bukit Amerta Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Arsitektur*, 6(2), 60–65. <https://doi.org/10.22225/undagi.6.2.1019.60-65>
- Sulistiyanto, B. (2020). *Benturan Kepentingan, Suatu Refleksi dalam Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia Conflict of Interest, a Reflection in Managing Cultural Heritage* (Vol. 29, Nomor 2).
- Sumaeni, N. M., & Mahagangga, I. G. A. O. (2018). Sistem Pengelolaan Terhadap Pura Tirta Empul Sebagai Daya Tarik Wisata Pusaka Di Tampak Siring Gianyar. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5(2), 322–326.
- Supartini, I. D. A., Diana, I. N., & Ardani, P. N. S. (2024). *Manajemen Operasional Pengelola Kawasan Pura Besakih*. <https://markandeyabali.ac.id/>
- Wibawa, G. A. S., Tastrawati, N. K. T., & Kencana, E. N. (2023). STRATEGI PENGELOLAAN PURA AGUNG BESAKIH SEBAGAI DESTINASI WISATA BUDAYA: PENDEKATAN GAME THEORY. *E-Jurnal Matematika*, 12(1), 16. <https://doi.org/10.24843/mtk.2023.v12.i01.p394>
- Widiarta, I. N. (2016). *PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PURA TAMAN AYUN SEBAGAI BAGIAN DARI WARISAN BUDAYA DUNIA*.
- Wijana, P. A. (2019). *ANALISIS BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PURA PUSEH DAN PURA DESA DI DESA BATUAN SEBAGAI DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN GIANYAR, BALI* (Vol. 2, Nomor 1).